

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Hibah Rp 16 Miliar Dibatalkan, Ratusan Calon Penerima Tak Lolos Verifikasi
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Senin, 10 Desember 2018

Hibah Rp 16 Miliar Dibatalkan

Ratusan Calon Penerima Tak Lolos Verifikasi

NGAMPRAH, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membatalkan pencairan dana hibah bidang keagamaan senilai lebih dari Rp 16 miliar. Pasalnya, ratusan calon penerima hibah tidak lolos verifikasi, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Bandung Barat Asep Hidayatulloh mengatakan, dana hibah yang batal dicairkan pada tahun anggaran 2018 tersebut akan menjadi sisa lebih penghitungan anggaran (silpa).

"Kami putuskan tidak akan mencairkan anggaran tersebut, karena setelah dilakukan verifikasi ada calon penerima hibah yang tidak sesuai dengan aturan," kata Asep di Ngampreh, akhir pekan lalu.

Aturan yang dimaksud itu, menurut dia, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Asep menjelaskan, sesuai dengan aturan itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima hibah. Kalau satu saja syarat tak dipenuhi, bantuan hibah dipastikan tak dapat dicairkan.

"Ternyata, setelah ditelusuri, banyak yang tidak berhak mendapat hibah. Ada yang tidak memiliki sekretariat, alamat, dan kepengurusan organisasinya tidak jelas, yang sampai pada saat mengajukan proposal tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari camat," katanya.

Asep menyebutkan, pada 2018 Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran dana hibah keagamaan sebesar Rp 37 miliar. Jumlah itu

naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 28 miliar. Namun, dari Rp 37 miliar itu anggaran yang terserap berjumlah sekitar Rp 21 miliar.

"Ada sekitar 1.500 calon penerima calon lokasi (CPCL) dana hibah bidang keagamaan ini. Sasarannya itu dewan kemakmuran masjid (DKM), pondok pesantren, dan yayasan yang bergerak di bidang keagamaan," kata Asep.

Pencairan dana hibah, lanjut dia, disalurkan langsung dengan cara ditransfer ke rekening calon penerima hibah. Dia pun memastikan bahwa dana yang ditransfer itu jumlahnya utuh sesuai dengan nilai yang ditetapkan, yaitu antara Rp 5 juta sampai Rp 250 juta.

Bansos daring

Asep menuturkan, pada 2019 pemberian hibah keagamaan bakal menerapkan sistem daring (*online*). Program hibah bansos daring itu, kata dia,

ditujukan agar bantuan yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

"Seluruh proses dalam hibah bansos daring dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ini dibutuhkan dalam memonitor hibah bansos dari Pemkab Bandung Barat," katanya.

Menurut dia, rencana penerapan hibah bansos daring itu turut memengaruhi jumlah proposal pengajuan yang masuk. Sampai awal Desember 2018, baru sekitar 400-an proposal pengajuan hibah buat tahun anggaran 2019.

"Dulu biasanya sudah ribuan proposal yang masuk ke Bagian Kesra, tapi sekarang baru sekitar 400-an proposal yang masuk. Soalnya, dalam aplikasi ini, begitu ada pengajuan yang persyaratannya tidak lengkap, walaupun hanya satu, langsung dicoret secara otomatis," tuturnya. (Hendro Husodo)***